

Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan

Sri Nurul Kur'aini*

Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kusuma Husada
Surakarta

Email: srinurulkuraini@ukh.ac.id

Abstrak

Keywords:

Pendapatan;
Kepesertaan; Minat
masyarakat; BPJS
Kesehatan;
Kunjungan

Jumlah kunjungan pasien umum selalu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien BPJS, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat di Kecamatan Duampanua dalam kepesertaan BPJS Kesehatan masih sangat kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebanyak 51.593 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling dengan besar sampel 100 orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi square. Hasil uji chi square menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel pendapatan ($p= 0,016$) terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Kesimpulan dalam penelitian bahwa ada pengaruh variabel pendapatan terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi seluruh warga Indonesia dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pada pasal 5 ayat 1-3 yang berbunyi : (1) “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”; (2) “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”; (3) “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab

menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya” (1).

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah (2).

Salah satu misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah memperluas kepesertaan JKN mencakup seluruh warga Negara Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan. Selain itu, sasaran BPJS Kesehatan yakni seluruh penduduk Indonesia (yang pada 2019 diperkirakan sekitar 257,7 juta jiwa) mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS kesehatan (3).

Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka mencapai UHC artinya seluruh Warga Negara Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta JKN, maka penting bagi semua sektor untuk turut mendukung dan melakukan berbagai upaya agar seluruh Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai peserta JKN melalui bukti kepemilikan kartu JKN (4).

Universal Health Coverage (UHC) telah menjadi tujuan utama reformasi kesehatan di banyak negara-negara. Pembiayaan adalah pendorong utama UHC dan banyak negara termasuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah sedang mencari opsi yang lebih baik untuk memodifikasi sistem pembiayaan kesehatan mereka untuk mendukung realisasi UHC (5).

Kebijakan UHC di bidang kesehatan, terutama dalam penyediaan jaminan sosial menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan sosial. Kesenjangan terjadi karena ketimpangan kesempatan yang menyebabkan orang miskin tidak dapat memperoleh kesempatan dalam mengakses layanan dan fasilitas kesehatan yang baik. Kepedulian perawatan kesehatan yang merata terutama pada pengurangan kesenjangan geografis, fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, kesehatan, dan kemampuan ekonomi, terutama bagi sebagian besar orang miskin yang tinggal di daerah pedesaan (6).

Dari tahun 2017 hingga tahun 2019, jumlah kunjungan pasien umum selalu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat di Kecamatan Duampanua dalam kepesertaan

BPJS Kesehatan masih sangat kurang. Selama lima tahun berjalannya program JKN, belum seluruhnya masyarakat Indonesia terlindungi JKN. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah peserta BPJS Kesehatan. Secara nasional, jumlah peserta BPJS Kesehatan hingga 1 Juni 2019 sebanyak 222.002.996 jiwa (82,53%) penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional dari total populasi sekitar 269.536.482 jiwa. Sedangkan cakupan kepesertaan untuk Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2019 sebanyak 9.400.000 jiwa yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk Kabupaten Pinrang, jumlah peserta BPJS hingga tahun 2019 sebanyak 217.432 jiwa. Fenomena yang terlihat di lapangan, BPJS Kesehatan belum optimal dalam meningkatkan jumlah peserta JKN di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang (7).

Hasil observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Duampanua dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan khususnya peserta BPJS Mandiri dikarenakan pendapatan masyarakat yang tidak mencukupi, sementara mereka memiliki banyak kebutuhan lain untuk dipenuhi seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Selain itu, pemikiran masyarakat jika mereka menjadi peserta BPJS Mandiri, seakan membuang uang secara percuma karena uang mereka tidak kembali seperti asuransi lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain *cross sectional*. Populasi sebanyak 51.593 jiwa sampel ditarik secara purposive sampling yaitu sebanyak 100 orang. Analisis data menggunakan metode analisis univariat dan bivariat. Analisis hubungan akan dilakukan

menggunakan tabulasi silang dengan uji *chi square*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Tabel 1 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan pendapatan per bulan. Berdasarkan karakteristik umur, jumlah responden paling banyak berada pada kelompok umur 41-50 tahun yaitu sebanyak 46 orang (46,0%), sedangkan jumlah responden paling sedikit berada pada kelompok umur 51-60 tahun yaitu sebanyak 5 orang (5,0%). Berdasarkan jenis kelamin jumlah responden yang paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53 orang (53,0%), sedangkan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 47 orang (47,0%). Berdasarkan pendidikan terakhir responden yang paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 44 orang (44,0%), sedangkan responden yang paling sedikit adalah tidak tamat SD yaitu sebanyak 2 orang (2,0%). Berdasarkan pekerjaan jumlah responden yang paling banyak adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) yaitu sebanyak 22 orang (22,0%), sedangkan responden yang paling sedikit adalah Pelajar/Mahasiswa yaitu sebanyak 7 orang (7,0%). Berdasarkan pendapatan per bulan jumlah responden yang paling banyak adalah <Rp 1.500.000 yaitu sebanyak 70 orang (70,0%), sedangkan responden yang paling sedikit adalah Rp 1.500.000-Rp 2.500.000 yaitu sebanyak 8 orang (8,0%).

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Kategori	Frekuensi	
		n	%
Umur	19-29	27	27,0
	30-40	22	22,0
	41-50	46	46,0
	51-60	5	5,0
Jenis Kelamin	Laki-Laki	53	53,0
	Perempuan	47	47,0

Pendidikan Terakhir	Tidak Tamat SD	2	2,0
	SD	12	12,0
	SMP	20	20,0
	SMA	44	44,0
	Perguruan Tinggi	22	22,0
Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa	7	
	PNS/TNI/POLRI	8	8,0
	Wiraswasta	14	14,0
	Buruh	17	17,0
	IRT	22	22,0
	Petani	18	18,0
	Karyawan Swasta	12	12,0
	Lainnya	2	2,0
Pendapatan Per Bulan	<Rp 1.500.000	70	70,0
	Rp1.500.000-Rp2.500.000	8	8,0
	>Rp 3.500.000	22	22,0
	<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 100 responden di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang jika dilihat dari pendapatan bahwa terdapat 70 orang (70,0%) yang memiliki pendapatan < Rp 1.500.000, 8 orang (8,0%) memiliki pendapatan Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000, dan sebanyak 22 orang (22,0%) memiliki pendapatan > Rp 3.500.000.

Tabel 2. Analisis Univariat Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Pendapatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Variabel	n	%
<Rp 1.500.000	70	70,0
Rp 1.500.000-Rp 2.500.000	8	8,0
>Rp 3.500.000	22	22,0
<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 100 responden, yang tergolong berpendapatan <Rp 1.500.000 dan minat tinggi yaitu sebanyak 25 orang (35,7%) dan yang berpendapatan <Rp 1.500.000 dan minat rendah yaitu sebanyak 45 orang (64,3%). Responden yang tergolong berpendapatan Rp 1.500.000-Rp 2.500.000 dan minat tinggi yaitu sebanyak 2 orang (25,0%) dan yang tergolong berpendapatan Rp 1.500.000-Rp 2.500.000 dan minat rendah yaitu sebanyak 6 orang (75,0%). Responden yang tergolong berpendapatan >Rp 3.500.000 dan minat tinggi yaitu sebanyak 15 orang (68,2%) dan yang tergolong berpendapatan >Rp 3.500.000 dan minat rendah yaitu sebanyak 7 orang (31,8%).

Hasil uji statistik diperoleh nilai $p = 0,016$, karena nilai $p < \alpha = 0,016 < 0,05$ maka H_0 ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh antara variabel pendapatan dengan minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

Tabel 3. Analisis Bivariat Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Tahun 2019

Variabel Pendapatan	Minat				Total	
	Tinggi		Rendah		n	%
	n	%	n	%		
<Rp1.500.000	25	35,7	45	64,3	70	100
Rp1.500.000-Rp2.500.000	2	25,0	6	75,0	8	100
>Rp3.500.000	15	68,2	7	31,8	22	100
Total	42	42,0	58	58,0	100	100
Hasil Uji Statistik	$p = 0,016$					

Sumber: Data Primer (2019)

3.2. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan ($p=0,016$) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Sejumlah penelitian

telah mengungkapkan hubungan antara pendapatan keluarga dan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan. Ketika studi ini didasarkan pada data survey, sering ditemukan bahwa keluarga-keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2018) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan pendapatan dengan keikutsertaan masyarakat BPJS Mandiri ($p=0,000$) (8).

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Abadi (2019) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi square diperoleh nilai $p=0,000$ ($p < 0,05$) sehingga H_0 ditolak yang berarti pendapatan berhubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri pada sektor informal Kota Makassar (9).

Penelitian di Tanzania oleh Kuwawenaruwa yang dikutip oleh Pemayun (2015) menyatakan bahwa kemauan masyarakat untuk menjadi peserta dalam jaminan kesehatan dipengaruhi oleh faktor gender dan sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi yang dimaksud seperti pendapatan keluarga, kelompok tertentu (wanita sebagai kepala keluarga), orang tua, dan masyarakat dengan status ekonomi rendah (10). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yani (2016) yang menyatakan bahwa hasil analisis bivariat diperoleh variabel pengetahuan, pendidikan, pendapatan serta akses terhadap pelayanan kesehatan memiliki nilai $p\ value < 0,05$ dan $PR < 1$ yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Air Manis (11).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Endartiwi (2018) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masih enggan untuk mendaftar menjadi peserta BPJS mandiri adalah karena faktor ekonomi, kurangnya informasi dan memang masih belum berminat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS secara mandiri (12).

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sa'adah (2017) yang menyatakan bahwa variabel pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam program asuransi BPJS Kesehatan (13). Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2011) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat mendaftar Jamkesmas dengan nilai p value $0,834 > 0,05$ (14).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh antara variabel pendapatan terhadap minat masyarakat dalam kepesertaan BPJS Kesehatan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu yaitu Universitas Kusuma Husada Surakarta. Semoga dengan adanya jurnal ini, dapat memberikan kontribusi kepada pihak kampus serta bagi lingkungan akademik.

REFERENSI

- [1] Departemen Kesehatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2013
- [2] Kementerian Kesehatan. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pusat Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2013.
- [3] Kementerian Kesehatan. Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019. 2012
- [4] Kurniawati, W., Rachmayanti. Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6, 33-39. 2018
- [5] Addae-Korankye, A. Challenges Of Financing Health Care In Ghana: The Case Of National Health Insurance Scheme (NHIS). *International Journal of Asian Social Science*, 3, 511-522. 2013.
- [6] Shihab, A. N. National Health Insurance Effects on Inpatient Utilization in Indonesia. *Health Sciences and Research*, Vol.7. 2017.
- [7] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. *Data Jumlah Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Pinrang Tahun 2018*. 2019.
- [8] Pohan, L. W. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Masyarakat dalam Kepesertaan BPJS Mandiri di Wilayah Kerja Puskesmas Kotapinang. 2018.
- [9] Abadi M. Y., Arifin, M. A., Darmawansyah, D., Rahmadani, S., Al Fajrin, M., & Marzuki, D. S. Analisis Keikutsertaan BPJS Kesehatan Mandiri Pada Sektor Informal di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS Dr. Soetomo*, 5(2), 114-124. 2019.
- [10] Pemayun, C. I. M. Pengambilan Keputusan Kepala Keluarga dengan Kartu Tanda Penduduk Bali untuk Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Mandiri Kelas III di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar Utara. Universitas Udayana. 2015.
- [11] Yani, P. S. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri Di Kelurahan Air Manis. Universitas Andalas. 2016
- [12] Endartiwi, S. S. Persepsi Masyarakat Terhadap Kemauan Untuk Mendaftar Menjadi Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *JHeS (Journal of Health Studies)*, 2, 81-92. 2018.
- [13] Sa'adah, D. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Program Asuransi BPJS Kesehatan (Studi Pada Masyarakat Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kec. Imogiri, Kab. Bantul). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

- Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- [14] Ernawati. Faktor Yang Berpengaruh
Terhadap Minat Mendaftar
Jamkesmas Di Kelurahan Tanjungmas
Kecamatan Semarang Utara Kota
Semarang Tahun 2011. Fakultas
Kesehatan Masyarakat, Universitas
Negeri Semarang. 2011.